

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA
JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBABKAN
TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA
(Studi Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)**

SKRIPSI

Oleh :
Jasrika Fajarul Fatah
NIM.C93215062



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jasrika Fajarul Fatah

NIM : C93215062

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN
RUSAK YANG MENYEBEBKAN TERJADINYA
KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA (Studi
Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 April 2019

Yang menyatakan



Jasrika Fajarul Fatah

NIM. C9321506

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jasrika Fajarul Fatah NIM. C93215062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2019

Pembimbing Skripsi,



Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Jasrika Fajarul Fatah NIM. C93215062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 Mei 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jasrika Fajarul Fatah
NIM : C93215062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : jasrika.fajarul.fatah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA
(Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

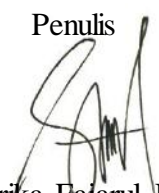
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2019

Penulis


Jasrika Fajarul Fatah

ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya (studi implementasi Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)” ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan menurut Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yang sumber data nya diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan kajian pustaka. Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan deduktif yakni penulis membahas tentang teori konsep Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana dan Hukuman yang selanjutnya membahas tentang teori pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dalam hukum yang berlaku di Indonesia kemudian teori tersebut digunakan menganalisis permasalahan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di kota Surabaya implementasi pasal 273 UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil penelitian di lapangan, praktik pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan belum diterapkan di wilayah Kota Surabaya meskipun sudah banyak kasus yang memungkinkan untuk adanya tindakan penegakan hukum. Berdasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu perbutan pidana, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf maka penyelenggara jalan dapat dikenakan hukuman berdasarkan pada Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009. Hukum pidana Islam menerapkan hukuman *Ta'zīr* dalam permasalahan ini. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama yang menyamakan permasalahan tentang kelalaian terhadap tanggungjawab yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan (*Mā jara majra al-khata'*) yaitu keadaan yang disamakan dengan kekeliruan atau kelalaian.

Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak di Kota Surabaya menurut Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009, penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku sesuai pasal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana islam penyelenggara jalan dapat dikenakan hukuman takzir dengan dasar pendapat para ulama yang menyamakan dengan kesalahan (*Mā jara majra al-khaṭa*). Penegakan hukum harus diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga akan tercipta rasa keadilan didalam masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUMAN.....	19
A. Penegakan Hukum dalam Islam.....	19
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.....	21
C. <i>Jarīmah</i>	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data laka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Lalu Lintas Bulan Januari-Desember tahun 2018	45
Tabel 3.2. Data kecelakaan lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya	47
Tabel 4.1. Pembagian Penyelenggara Jalan menurut Status Jalan.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pijakan dalam hal penegakan keadilan di negeri ini karena di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan di dalam pasal 1 ayat (3) “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Maka dari itu setiap tindakan, aktifitas dan perilaku warga negara harus berdasarkan hukum. Setiap warga Negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi adanya hukum di Negara Republik Indonesia. Selain itu, warga Negara juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara dan mendapatkan derajat yang sama di mata hukum untuk semua warga Negara tanpa terkecuali seperti yang telah tercantum dalam u ndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.² Dengan demikian setiap warga Negara baik Presiden maupun rakyat biasa wajib menjunjung tinggi adanya hukum dan apabila melanggar hukum maka akan diperlakukan sama di mata hukum.

Ada beberapa jenis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah hirarki perundang-undangan dalam UU PPP yang diatur dalam pasal 7 sebagai berikut :³

1. Undang-undang Dasar 1945

¹ Tim Penyusun Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya*, (Jakarta:Grasindo,2017), 55

² Ibid., 80.

³ Tim Penyusun YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 31

UUD 1945 sebenarnya secara tidak langsung sudah mengakui pentingnya

“yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya. Sebaliknya meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tentu tidak merintang jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis.”

Keadaan di Indonesia amat berbeda. Hukum bagai duduk di atas bara api. Setiap saat hukum seperti mengalami referendum, hukum yang selalu digugat. Hukum bukan lagi mesin otomatis yang bekerja linier, tetapi institut yang penuh gejolak. Orang menggeruduk masuk ruang sidang pengadilan, berteriak, marah, bertepuk tangan. Kepercayaan dan penghormatan terhadap hukum terasa sangat rendah. Apakah penegakan hukum sekedar menerapkan teks? Tidak! Secara progresif, kita harus menguji sampai sejauh mana kemampuan teks itu. Menghadapi krisis sekarang ini, masyarakat perlu mengubah cara ber hukum dari “membaca dan menerapkan teks” menjadi penegakan hukum progresif yang “menguji batas kemampuan teks” mudah-mudahan dengan cara penegakan hukum progresif kepercayaan dan penghormatan terhadap hukum dapat dipulihkan.⁸

⁷ Iskandar, *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 111

Akan tetapi, dalam praktik dilapangan selama ini ada beberapa undang-undang yang sudah jelas tertulis bagaimana penerapannya, penindakannya, dan juga hukumannya namun belum di tegakkan. Dalam pembahasan ini penulis tertarik untuk meneliti penerapan penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 273. Dalam pasal tersebut menyatakan :¹⁰

1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan / atau kerusakan kendaraan dan / atau barang di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

¹⁰ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- Juta Rupiah)
- egara jalan yang tidak memberi tanda atau rabu
belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam p
dengan pidana penjara paling lama 6 bulan ata
1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
a lihat dalam pasal tersebut sangat jelas menyebu
aan akibat jalan rusak yang di maksud dalam pa
2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut
enyelenggara jalan dapat di hukum dengan pida
lah tertera dalam pasal tersebut . tetapi yang ter

akibat jalan rusak yang di maksud dalam pasal
2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut
penyelenggara jalan dapat di hukum dengan pidana
lah tertera dalam pasal tersebut . tetapi yang ter
banyak kasus kecelakaan akibat jalan yang rus
yang penulis temukan tidak satupun yang di tinda
suai dengan pasal tersebut, selain itu penulis juga
faktori putusan mahkamah agung tidak ada
pasal tersebut. Terlebih di kota besar seperti
akses jalan yang mengalami kerusakan . Di

Dalam hukum Islam, Al Qur'an telah menjelaskan didalam surah an-Nisa'

ayat 135 :¹¹

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas dengan gamblang menjelaskan kaidah hukum di dalam Islam.

Dan, Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya telah memberikan teladan dalam menjabarkan ayat di atas dalam kasus-kasus hukum yang beliau hadapi. Seperti halnya dalam kasus Fatimah binti Aswad, dia adalah seorang wanita dari suku Bani Makhzumiyyah yang melakukan pencurian. Karena wanita tersebut dari suku yang terpandang, maka para sahabat sungkan untuk menerapkan hukum kepadanya. Kemudian para sahabat mengutus Utsamah bin Zaid untuk menghadap Nabi saw guna memintakan pengampunan untuk wanita tersebut. Setelah mendengar Utsamah Nabi saw bersabda :¹²

“Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran umat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu orang yang terpendang, mereka

¹¹ *Al Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 120

¹²Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof Dr, H, Busthanul Arifin, S, H,.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 24-25

Dari kedua dalil tersebut sudah cukup jelas bahwa setiap hukum harus di tegakkan. Siapapun pelanggar hukumnya walaupun itu orang yang terpandang, bahkan dalam hadist tersebut walau puteri Nabi saw sendiri pun maka harus di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika kita lihat penerapan pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penegakan hukum pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan yang tercantum dalam pasal tersebut harus di tegakkan sepenuhnya tanpa memandang siapa yang akan di proses dalam hukum tersebut.

وَلَا تَنْزُرْ وَازِرَةً ۖ وَزْرًا أُخْرَىٰ

Ayat tersebut sebagai dasar bahwa pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan itu di terima oleh masing-masing pelaku perbuatan tersebut. Begitu pula perbuatan pidana, siapa yang melanggar aturan maka dia yang di pidana.

B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas sampai saat ini dalam penerapan pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Hukum acara pidana pembuktian terhadap penyelenggara jalan dalam pertanggungjawaban pidana dalam pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tidak adanya penegakan dalam suatu hukum yang berlaku.
5. Pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan terhadap jalan yang rusak yang menyebabkan kecelakaan sesuai pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam persepektif Hukum Pidana Islam.

Dari beberapa permasalahan yang penulis identifikasi, maka penulis menganggap perlunya batasan masalah supaya dalam penelitian ini tidak meluas dalam pembahasannya. Dengan ini penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasa masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut Hukum Pidana Islam?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar maslah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.¹⁴

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8

Memang permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini bukanlah permasalahan yang baru, oleh karena itu penulis mencantumkan beberapa skripsi terdahulu untuk membuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil dari duplikasi. Sejauh penelusuran penulis ada beberapa judul skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan judul penulis yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh B. Assidiq dari Universitas Lampung dengan judul “kebijakan kriminal dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan”. Dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah kebijakan kriminal yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan tidak membahas tentang Hukum Pidana Islamnya. Jadi jelas sangat berbeda dengan skripsi yang penulis bahas, dalam skripsi di atas membahas keseluruhan Undang –undang sedangkan skripsi penulis hanya fokus pada pasal 273 saja, dan juga fokus dalam pandangan Hukum Pidana Islam dari pasal tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Zudhi Muslikh yang berjudul Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan Jalan Rusak. Dalam skripsi ini, hanya membahas teori pertanggungjawaban penyelenggara jalan terhadap jalan rusak. Namun, tidak membahas tentang fakta empiris di lapangan dan tidak membahas pandangan Hukum Pidana Islam terhadap hal tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis saat ini.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai maksud dan tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut Hukum Pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dalam pertanggung jawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak dan menurut Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-undang dengan semaksimal mungkin kepada siapapun. Kepada pihak penyelenggara jalan untuk lebih memperhatikan dalam pemeliharaan jalan yang rusak. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan yang rusak.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami istilah dalam judul skripsi ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam : adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan Hukum Pidana materiil serta pelaksanaan Hukum Pidana formil sesuai dengan ketentuan Islam.
2. Pertanggungjawaban pidana : adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas duatu tindakan yang terjadi.
3. Penyelenggara jalan : adalah direktorat Jendral Bina Marga
4. Jalan yang rusak : adalah jalan yang sudah berlubang atau tidak layak pakai dan tidak layak dilewati yang tak kunjung diperbaiki oleh penyelenggara jalan.

2. Teknik pengumpulan data

- a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut digunakan teknik seperti berikut :

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang di teliti.¹⁶ Dalam penelitian ini guna mendapatkan data-dat yang di perlukan, penulis melakukan pengamatan di lapangan mengenai penerapan pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kegiatan organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang di wawancarai.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap ditlantas polrestabes surabaya untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan.

3) Pustaka

Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini yang bersumber dari literature-

¹⁶ Sutrisno hadi, *Metodologi research II* (Yogyakarta: Andi offset, 1989), 217

¹⁷ Burhan bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT , Raja Grafindo, 2007), 155

literatur, buku-buku, yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini.

3. Teknik pengolahan data.

Data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber kemudian diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data secara cermat tentang kelengkapan relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun berdasarkan hasil observasi dan penelitian lapangan sehingga pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data *outline* sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c. *Concluding*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

a. Deskriptif Kualitatif

Deskriptif sendiri adalah metode penelitian dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai dengan apa adanya. Sedangkan kualitatif adalah cara penyajian data secara sistematis,

factual, dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan dan disajikan dalam bentuk tertulis bukan dalam bentuk angka.¹⁸

b. Empiris

Empiris adalah suatu kegiatan untuk mengkaji suatu hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penulis dan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam pembahasan karya ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian penegakan hukum, dasar penegakan hukum, pengertian pertanggungjawaban pidana , dasar hukum pertanggungjawaban, pidana menurut Hukum Pidana Islam.

Bab tiga membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

¹⁸ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta:sinar grafik, 2002), 12

¹⁹ Ibid, 15

BAB II

A. Penegakan Hukum dalam Islam

Pengakuan hukum adalah pelaksanaan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum Islam. proses pelaksanaan dari penjatuan atau pemidanaan juga harus mengikuti pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, tidak boleh melaksanakan hukuman bukan melalui prosedur yang benar atau main hakim sendiri.¹

Hukum tidak akan bermanfaat apabila dari penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Akibatnya rasa keadilan masyarakat akan terganggu dan tujuan hukum tidak tercapai. Untuk itu, mari kita merujuk pada keteladanan nabi Muhammad SAW. Nabi menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan menerima iman seseorang jika tidak diwujudkan dalam amal sholeh, sebaliknya Allah pun tidak akan menerima perbuatan seseorang jika tidak terpancar dari keimanan kepada-Nya. Maka kaidah penegakan hukum dalam Islam merupakan pancaran tauhid yaitu *Āmanū wa'amilu as-sālihāt*.²

Di dalam Al-Qur'an penegakan hukum sendiri telah gamblang tercantum dalam surat *An-Nisa'* ayat 135³

¹ Teuku Abdul Manan, *Mahkaman Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), 149.

² Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 24.

³ *Al Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 100.

Artinya:

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa manusia yang takkan keadilan. Apabila ada hukum yang menyimpang ia yang beriman wajib untuk meluruskannya. Selain itu dalam hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kasus, dia adalah seorang wanita dari suku Bani Makhzumiyyah. Karena wanita tersebut dari suku yang terpandang, maka para sahabat ingin untuk menerapkan hukum kepadanya. Kemudian para sa-

wanita tersebut. Setelah mendengar Utsamah Nabi saw bersabda :⁴

mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah, jika Fatimah anak

65 tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifn, S.H., (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 24-25

Dalam cerita diatas menjelaskan akan pentingnya penegakan hukum dan dalam menegakkan hukum tidak memandang siapa yang dihukum. Wibawa hukum merupakan hasil dari pelaksanaan penegakan hukum yang benar. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip dan kaidah seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maka hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam mempunyai arti pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dan mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu:

- Apabila ketiga unsur tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. dan jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawabannya. Maka dari itu suatu pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada manusia (subjek hukum pidana) yang berakal pikiran, dewasa, dan merdeka (berkemauan sendiri). Selain

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Jika kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Contohnya adalah seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum kemudian ia menabrak orang sehingga mati, maka pengendara tersebut dikenakan pertanggungjawaban. Alasannya pengendara tersebut bisa hati-hati dan kemungkinan bisa menghindari akibat tersebut, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, apabila pengendara mobil tersebut melewati suatu jalan yang berdebu dan kemudian dari laju kendaraannya menimbulkan angin yang membuat debu berterbangan dan mengenai mata orang yang lewat sampai mengakibatkan buta maka pengendara mobil tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban karena menghindari debu dari kendaraan yang sedang melaju sangat sulit untuk dilakukan.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan) dan akibat yang timbul dari padanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh, apabila seseorang memarkir kendaraan

Tingkatan pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat pula sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tersebut. Tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan *Qasad* (niat) nya. Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu adalah:⁹

1. Sengaja (*Al-'Amdī*). Dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum-minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.
2. Menyerupai senngaja (*Shibhu Al-'Amdī*) perbuatan menyerupai sengaja atau semi sengaja hanya terdapat dalam *Jar'imah* pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Shibhu Al-'Amdī* ini masih diperselisihkan oleh imam para madzhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Shibhu Al-'Amdī* dalam *Jar'*

īmah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qaṭl Al-‘Amdī*) dan pembunuhan keliru (*Qaṭl Al-Khatha’*). Adapun dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku ini sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi’I dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Shibhu Al-‘Amdī* dalam *Jar īmah* pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam *Jar īmah* penganiayaan. Menurut Syafi’I bahwa *Jar īmah* penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam kategori sengaja dan bisa pula masuk dalam kategori semi sengaja. Pendapat ini adalah pendapat yang *Rajih* dalam Madzhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam *Jar īmah* penganiayaan itu tidak ada *Shibhu Al-‘Amdī*. Pendapat ini diakui pula di kalangan madzhab Ahmad yang dianggap *Marjuh*. Pengertian *Shibhu Al-‘Amdī* dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian *Shibhu Al-‘Amdī* dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam Islam secara konkrit dapat dibagi sebagai berikut:¹¹

1. Menjalankan ketentuan syariat. Manusia sebagai seorang hamba wajib patuh kepada Allah SWT Rasulullah SAW dan Ulil Amri dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini sebagai contoh seorang hakim yang telah menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri maka hakim tersebut tidak dapat dipersalahkan telah menyebabkan putusnya tangan orang lain karena ia melakukan tindakan berdasarkan syariat.

¹¹ Ibid 105

2. Karena perintah jabatan. Dalam hal ini perintah penguasa yang sah dan sesuai ketentuan syariat Islam saja yang wajib dipatuhi. Apabila perintah penguasa tersebut mengandung untuk berbuat maksiat, maka kewajiban mematuhi menjadi lenyap dan dalam hal seperti ini orang yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dikecualikan dari hukuman seandainya perbuatan yang dilakukan ternyata merupakan tindak pidana.
3. Keadaan paksa. Paksaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diperintahnya yang disertai dengan ancaman. Suatu perbuatan dapat dikatakan terpaksa apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Ancaman yang disertakan dalam perintah tersebut sehingga bisa menghilangkan kerelaan seperti akan dibunuh, akan dianiaya dan lain sebagainya.
 - b. Ancaman harus seketika yang diduga kuat pasti terjadi, apabila seseorang yang telah dipaksa tidak melaksanakan keinginan pemaksa.
 - c. Orang yang memaksa mempunyai kemampuan untuk melakukan ancamannya.
 - d. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi kalau tidak memenuhi keinginan pemaksa.
4. Pembelaan diri. Siapa saja yang berperang di jalan Allah SWT dan kemudian ia membunuh atau terbunuh maka ia akan memperoleh ganjaran akhirat berupa surga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa orang yang membunuh di

- a. Adanya serangan yang melawan hukum.
- b. Penyerangan harus terjadi seketika.
- c. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan kecuali menyerang balik.
- d. Dalam penolakan serangan hanya kekuatan seperlunya yang dipakai tidak berlebih-lebihan.

- juga yang merupakan pemaafan *Jar imah* nya.

7. Meninggalnya pelaku *Jar īmah*. Hal ini dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena orang yang dibebani pertanggungjawaban tersebut meninggal dunia dan secara otomatis dia tidak bisa untuk dibebani dengan pertanggungjawaban.
8. Tobat. Tobat bisa menghapuskan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku manakala dia menunjukkan penyesalan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, kemudian ia menjauhkan diri dari perbuatan tersebut dan tidak mengulangi kembali. Apabila *Jar īmah* tersebut berkaitan dengan hak perorangan maka pelaku harus melepaskan ke-*dzalim*-an dengan cara meminta maaf kepada korbannya.
9. Kadaluwarsa. Hal ini terjadi apabila lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya tindak pidana yang telah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman. Menurut kebanyakan *fuqaha* hal ini tetap tidak menghapuskan sedangkan ada beberapa *fuqaha* yang memakai prinsip kadaluwarsa tidak pula menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh *Jar īmah*. Ada dua teori dalam kadaluwarsa menurut para *fuqaha* yaitu:
 - a. Suatu hukuman atau *Jar īmah* tidak gugur dengan kadaluwarsa selama *Jar īmah* itu bukan *Jar īmah Ta'z īr*. Teori ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.
 - b. Mengakui adanya prinsip kadaluwarsa dalam *Jar īmah Ta'z īr* namun mengakui adanya kadaluwarsa untuk *Jar īmah Qiṣaṣ-diyat* dan satu *Jar īmah Hudud* yakni untuk *Qadhaf*.

10. Pendidikan dan pengajaran. Orang yang berhak memberikan pendidikan dan pengajaran adakalanya suami terhadap istri dan adakalanya orang tua terhadap anak. Hal ini dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindakannya memang ditujukan untuk mendidik dan mengajarkan.
11. Pengobatan. Seorang dokter harus professional di dalam melaksanakan kewajibannya dan mempunyai tanggungan untuk menyembuhkan pasiennya. Maka dari itu seorang dokter tidak dapat dituntut dan terbebas dari pertanggungjawaban pidana apabila yang dilakukannya merupakan kebutuhan masyarakat untuk kesembuhan pasien dan adanya izin dari pasien dan keluarganya untuk mengambil suatu tindakan dari dokter tersebut, misalnya amputasi anggota badan.
12. Olahraga. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi dan membolehkan jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitkan keberanian serta kepahlawanan melalui kegiatan olahraga seperti pacuan kuda, panahan, tinju, angkat besi dan lain sebagainya. Terkadang olahraga menyebabkan luka-luka baik pemain maupun wasit, maka dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan syariat umum karena bukan termasuk dalam permainan olah raga. Apabila pemain dengan sengaja melukai lawan maka ia harus bertanggungjawab dengan kesengajaan, namun apabila pemain tersebut keliru ataupun lalai ia harus bertanggungjawab dari kelalaiannya. Dan mereka tidak dikenakan hukuman dari luka-luka yang timbul jika tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

13. Hapusnya jaminan keselamatan. Hal ini adalah bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota-anggota badannya, sehingga dengan demikian ia bisa dibunuh atau dilukai. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi dasar-dasar hapusnya keselamatan jiwa atau anggota badan yaitu iman (Islam) dan jaminan keamanan sementara atau seumur hidup dengan kata lain apabila seseorang murtad maka ia telah kehilangan jaminan keselamatan. Selain itu jaminan keselamatan juga dapat dihapus apabila seseorang melakukan *Jar ĩmah Hudud* dan *Qıřaş* seperti *Zina muhsan*, perampokan, pemberontakan, pencurian, pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.
14. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Hal ini otomatis akan menghapuskan sanksi atau pertanggungjawaban pidana pelaku *Jar ĩmah* karena objek yang akan dihukum tidak ada, seperti apabila seseorang yang ketahuan mencuri dan memenuhi kadar yang telah ditentukan dalam pencurian maka ia wajib untuk melaksanakan hukuman potong tangan. Akan tetapi ternyata pelaku tersebut telah kehilangan kedua tangannya maka hapuslah pertanggungjawaban pidana tersebut.¹²

C. *Jarimah*

Arti *Jar īmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Hudud*, *qīṣaṣ*, *diyat*, atau *Ta'z īr*. Adakalanya larangan Syara' yang dimaksud di atas adalah mengerjakan

¹² Zakaria Syafei, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qalam*, Vol 31 no 1 (Januari-Juni, 2014), 104-112.

berkaitan dengan hak Allah SWT. Dengan demikian kejahatan dalam kategori ini dapat diartikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah SWT.¹⁵

Kata *hudud* sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *Hadd*. *Hadd* secara harfiah terdapat beberapa kemungkinan arti yaitu siksaan, ketentuan atau hukum. Menurut syariat Islam, ketetapan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran dan atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan definisi dari *hudud*. Dapat di simpulkan bahwa tindak kejahatan yang dimaksud baik dilakukan oleh perseorangan atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Jenis-jenis *Hadd* dalam Syariat Islam yaitu: *Rajam*, *Jilid* (Dera), potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan, dan salib. Adapun delik pidana yang pelakunya diancam dengan sanksi *Hadd* yaitu zina, *Qadhaf* (tuduhan zina), *Sariqah* (pencurian), *harabah* (perampokan), *Khamr*, *Bughah* (pemberontakan), dan *Riddah ataua murtad* (peralihan agama).¹⁶

2. Qışaş

Jar īmah Qiṣaṣ jatuh pada antara *Jar īmah Hudud* dan *Ta'z īr* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *Qiṣaṣ* ini kurang serius dibandingkan dengan *hudud*, namun lebih berat dari pada *Ta'z īr*. Sasaran

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (jakarta:Gema Insani Press,2003), 22

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ
رَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {١٧٨} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٧٩}

Kejahatan yang masuk dalam golongan *Qisas* ini, dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Hikmah adanya hukum *Qisas* ini, sebagaimana dijelaskan Al Jurjawi adalah

¹⁸ *Al Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 27

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10-11

Sanksi *Ta'z̄ir* yang berkenaan dengan harta ini bukan berarti mengambil harta pelaku untuk pribadi hakim ataupun Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku diharapkan dapat bertaubat maka hakim dapat menyerahkan kembali harta tersebut demi kemaslahatan. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *Ta'z̄ir* yang berkaitan dengan harta ini menjadi tiga macam dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, diantaranya adalah :²³

- a. Menghancurkannya. Ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkaran.
- b. Mengubahnya (*Al-ghayir*). Yang dimaksud mengubah disini adalah mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Memilikinya (*al-Tamlik*). Sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan di tentukan oleh *ulil amri* dalam hal ini diwakili oleh hakim. Seperti halnya ketika Rasulullah menghukum pencuri buah-buahan dengan melipat gandakan dendanya meskipun ia juga harus menjalani hukuman cambuk. Selain itu ketika masa khalifah

A. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota yang terletak pada koordinat 7°16'S 112°43'E/7.267°S 112.171°E memiliki 31 kecamatan dan 163 kelurahan yang total luas dari wilayah kota Surabaya adalah 336km². Dari luasnya kota Surabaya masih terdapat beberapa jalan yang rusak meskipun dari tahun ke tahun selalu diperbaiki. Dilansir dari Surya.co.id yang diunggah pada 13 Februari 2016 menyatakan bahwa masih ada jalan yang berlubang di kota Surabaya yang menimbulkan kecelakaan. Namun, tidak ada masyarakat yang membawa masalahnya ke ranah hukum.¹

¹ Ahmad Zaimul Haq, *Kecelakaan Akibat Jalan Rusak, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah*, <http://surabaya.tribunnews.com/amp/2016/02/13/kecelakaan-akibat-jalan-rusak-masyarakat-bisa-gugat-pemerintah>, diakses pada 10 Januari 2019 pukul 22.09 WIB

Selain itu, MetroTVNews.com pada 12 Juni 2018 juga mengunggah sebuah artikel terkait warga yang mengeluhkan jalan di Surabaya yang rusak, tepatnya di daerah Oso Wilangan. Warga dan pengguna jalan, mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam memperbaiki jalan Oso Wilangan di Surabaya yang rusak dan kerap memakan korban jiwa. “ini disebabkan karena dari tahun ke tahun jalan nasional itu selalu terjatuh, berlubang, dan bergelombang, meski berkali-kali telah diperbaiki. Jalan Oso Wilangan ini pasti rusak. Tapi tidak pernah ada perbaikan yang serius, hanya tambal sulam saja, kalau hujan pastilah berlubang.” Kata Susanto salah satu warga setempat kepada Metcom.id Selasa, 12 Juni 2018.³

2 *Firman, Jalan Rusak di Surabaya Makin Parah,*
http://surabayapagi.com/read/148933/2017/01/17/jalan_rusak_di_surabaya_makin_parah.html,
diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 11.57 WIB

3 *Amaluddin, Warga Keluhkan Jalan Nasional di Surabaya Rusak,*
<http://metrotvnews.com/amp/akW3XBMk-warga-keluhkan-jalan-nasional-di-surabaya-rusak>,
diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 22.46 WIB

B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban

Simons berpandangan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus mencapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut si pelaku itu sendiri, yaitu kemampuan bertanggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan, dan *dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).

Soema Di Praja mengemukakan pendapatnya bahwa bagian-bagian dari KUHP telah mengajukan beberapa hal sebagai syarat untuk dipidananya seorang

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan atau kealpaan dan, tidak ada alasan pemaafan.

Penerapan pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 ini seperti tidak pernah diproses di ranah hukum. Tidak ada satupun putusan Mahkamah Agung mengenai kasus yang menggunakan pasal tersebut. Maka dari itu, penulis menghimpun beberapa data yang terjadi di lapangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan implementasi pasal tersebut. Sumber-sumber tersebut adalah:

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi memiliki tugas utama untuk memelihara ketertiban dan

menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.⁶

Ada tugas lain yang sangat penting dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu menekan angka kecelakaan, mengatur dan menertibkan lalu lintas. Polisi yang mendapatkan tugas tersebut adalah Polisi Lalu Lintas. Mereka lah yang berwenang untuk menangani kasus-kasus kecelakaan lalu lintas termasuk yang dibahas dalam penelitian ini.⁷

Surabaya merupakan kota yang sangat berkembang pada saat ini,. Pembangunan yang sangat pesat sedang digalakkan di Kota Pahlawan ini. Nyaris fasilitas publik terpenuhi dengan segala kenyamanannya. Meskipun demikian, jumlah kecelakaan di Kota Surabaya menurut data dari Unit Laka Ditlantas Polda Jatim tahun 2018 merupakan jumlah terbesar ke 5 di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Data laka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat
Lalu Lintas Bulan Januari-Desember tahun 2018

No	KESATUAN	JK	MD	LB	LR	KERMAT
1	KOTA BESAR SURABAYA	1.191	178	176	1.257	1.291.300.000
2	PELABUHAN TANJUNG PERAK	123	44	0	133	226.500.000
3	GRESIK	682	193	6	850	1.118.300.000
4	SIDOARJO	1.518	273	9	1.843	604.750.000
5	MOJOKERTO KOTA	371	52	4	472	1.055.700.000
6	MOJOKERTO	897	157	23	1.040	709.650.000
7	MALANG KOTA	213	52	3	273	215.600.000

⁶ Tim Penyusun Kepolisian Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya*, (Jakarta: Visi Media ,2007), 3-6.

⁷ Dien Al Banna, *di Jalan ada Maut Hati-hati atau Mati*, (Jember: Jember Kata Media, 2017), 89.

rusak terutama kecelakaan tunggal. Menurut keterangan Kasi Laka Ditlantas Polda Jatim yang ditemui di ruangannya, beliau mengatakan bahwa faktor mengapa tidak ada laporan terhadap implementasi pasal tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Undang-undang tersebut. Selain itu, faktor yang juga sangat mempengaruhi tidak adanya implementasi pasal tersebut adalah mayoritas masyarakat yang sering berfikir negatif terhadap kepolisian yang mana mereka berpendapat bahwa apabila berurusan dengan polisi maka akan semakin berbelit-belit dan ujung-ujungnya uang.⁸

Beliau juga menjelaskan bahwa kecelakaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah :

- a. Manusia. Faktor terbesar yang menyebabkan kecelakaan adalah dari manusia, terkadang mereka lalai ketika mengemudikan kendaraan atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya berujung pada kecelakaan, ada juga yang di sengaja, tapi biasanya ini bermotif dendam antara pelaku terhadap korban sehingga terjadilah kecelakaan yang di sengaja tersebut.
- b. Alam. Faktor ini terjadi apabila adanya keadaan alam atau mungkin bencana alam yang menyebabkan kecelakaan, seperti contoh terjadinya tabrakan antara dua kendaraan yang melaju di sebuah jalan yang di sebabkan karena terjadinya gempa yang menyebabkan pengendara tersebut tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan.
- c. Kendaraan. Faktor ini bisa juga terjadi ketika kendaraan yang di kemudikan tiba tiba mengalami kerusakan. Kasus yang sering terjadi dalam faktor ini adalah terjadinya kecelakaan karena tiba-tiba rem blong, ban pecah dan lain sebagainya.

Dari beberapa faktor tersebut untuk dapat diidentifikasi faktor manakah yang menyebabkan kecelakaan harus di lakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap kecelakaan yang terjadi. Kemudian Aiptu Ngadianto juga menjelaskan bahwa proses penindakan dalam kasus kecelakaan khususnya kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak hukum acara

pidananya sama dengan tindak pidana yang lain. Jadi pertama Polisi harus menerima laporan atau pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat yang mengetahui kejadian kecelakaan. Kemudian barulah Polisi melakukan tindakan identifikasi di tempat kejadian perkara untuk mengetahui motif dan penyebab terjadinya kecelakaan. Diantara proses identifikasi yang dilakukan oleh Polisi yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan, semakin banyak bukti yang ada maka semakin cepat kasus akan terungkap. Diantara bukti-bukti yang dipaparkan oleh Aiptu Ngadianto yang ditemui di Unit Laka Polretabes Surabaya yaitu:

- a. Barang bukti, ini merupakan barang-barang yang bisa menjadi petunjuk kejadian kecelakaan.
- b. Surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
- c. Visum, adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter di dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup ataupun mati.
- d. Saksi, adalah orang yang mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung kejadian kecelakaan.
- e. CCTV, adalah rekaman kejadian yang tertangkap oleh kamera yang biasanya di pasang oleh pemerintah yang bersangkutan.

Dari hal-hal tersebut barulah bisa dipastikan apakah kasus kecelakaan itu dinaikkan statusnya untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Apabila telah selesai dilakukan proses sidik dan lidik selanjutnya kasus akan

Jikalau masyarakat ingin mengadukan kejadian kecelakaan karena jalan rusak, dari pihak kepolisian siap membantu untuk memproses kejadian tersebut. namun, biasanya masyarakat tidak melapor karena enggan berurusan dengan Polisi yang dalam pengetahuan masyarakat akan semakin berbelit, dan mungkin masyarakat enggan untuk melapor karena yang dijadikan tersangka di sini adalah Pemerintah Kota.⁹

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota atau Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dari Dinas Perhubungan adalah melaksanakan Urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Fungsi dari Dinas Perhubungan adalah:

Akan tetapi jika berbicara jalan yang rusak, maka itu bukan kewenangan Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan hanya membantu memberi tanda atau rambu terhadap jalan rusak tersebut, namun yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Direktorat Jederal Binamarga, karena fokus tugas mereka adalah menyelenggarakan dan merawat jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT Jasa Raharja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus selalu sejalan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas. Lembaga ini adalah alat untuk melakukan tugas dan tanggungjawab sosial untuk memupuk, menghimpun, dan menyalurkan dana santunan Jasa Raharja

kendaraan, sumbangan sukarela yang tertera dalam surat tanda nomor kendaraan, pajak dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah denda yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 itu masuknya ke kas negara melalui proses peradilan bukan ke Jasa Raharja.¹⁴

4. Masyarakat yang Menjadi Korban Kecelakaan akibat Jalan Rusak

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang buta akan hukum, karena mayoritas masyarakat takut apabila berurusan dengan hukum. Dalam pemahaman masyarakat, hukum itu ruwet dan berujung pada uang. Maka dari itu korban kecelakaan enggan untuk melaporkan kejadiannya ke pihak yang berwajib. Begitulah keterangan dari Nashirothul Fuadiyah salah satu korban kecelakaan karena jalan rusak. Beliau juga mengatakan, ketika setelah mengalami kecelakaan, masyarakat yang menolongnya menyarankan untuk segera menuju ke bengkel supaya tidak berurusan panjang dengan pihak kepolisian.¹⁵

¹⁴ Mirza, *wawancara*,Jasa Raharja Perwakilan Kota Surabaya,2 Januari 2019.

¹⁵ Nashirotul Fuadiyah, *wawancara*, Wonocolo Kota Surabaya, 10 Januari 2019.

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya Berdasarkan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009

Penyelenggara jalan dibagi menjadi dua macam yaitu penyelenggara jalan umum dan penyelenggara jalan khusus. Adapun kewajiban penyelenggara jalan umum di dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang jalan yaitu:²

- ¹ Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan

² Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan

- [illegible]

yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh keterbatasan prasarana transportasi jalan, yang akan meningkatkan pelayanan kegiatan perkotaan.

Sementara itu, pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi angkutan umum di wilayah kota-kota besar. Pemerintah juga menyadari bahwa sebagai negara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan umum merupakan bagian dari sistem jaringan jalan.

Pengelolaan jalan khusus dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus yaitu, penyelenggara jalan khusus adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mengelola jalan untuk melayani kepentingannya sendiri.³

[illegible]

- yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh keterbatasan prasarana transportasi jalan, yang akan meningkatkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- Sementara itu, pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi angkutan umum di wilayah kota-kota besar. Pemerintah juga menyadari bahwa sebagai negara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan umum merupakan bagian dari sistem jaringan jalan.
- Pengelolaan jalan khusus dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus yaitu, penyelenggara jalan khusus adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mengelola jalan untuk melayani kepentingannya sendiri.³

ang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan kemudahan prasarana transportasi jalan, yang akan mendukung pelayanan kegiatan perkotaan. Pemerintah juga mewujudkan pelayanan jasa distribusi angkutan umum. Pemerintah juga harus memperhatikan bahwa jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan umum harus memperhatikan sistem jaringan jalan. Pemerintah juga harus memperhatikan bahwa jalan khusus dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Jalan Umum, yaitu, penyelenggara jalan khusus adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan untuk melayani kepentingannya sendiri.³

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor :
11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khusus, jalan khusus
bisa berubah menjadi jalan umum jika:

1. Penyelenggaraannya diserahkan kepada Kabupaten atau Kota
2. Penyelenggaraan diambil alih oleh pemerintah kabupaten atau kota

Dilihat dari penjelasan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu jalan di kota Surabaya dapat dikategorikan sebagai jalan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara jalan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khusus. Jika dilihat, objek yang diteliti seperti jalan Kalianak, Margomulyo, Tandes –Osowilangun dan beberapa jalan yang berada di Kota Surabaya merupakan kategori jalan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adapun beberapa pembagian penyelenggara jalan menurut status jalan yaitu:

Tabel 4.1.
Tabel Pembagian Penyelenggara Jalan menurut Status Jalan

Status Jalan	Penyelenggara Jalan	Pelaksana Jalan
Jalan Nasional	Pemerintah Pusat	Menteri Pekerjaan Umum
Jalan Provinsi	Pemerintah Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Jalan Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Jalan Kota	Pemerintah Kota	Dinas Pekerjaan Umum Kota
Jalan Desa	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Dari tabel di atas, dapat dilihat dalam permasalahan yang diangkat yaitu pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di kota Surabaya merupakan tanggungjawab pemerintah kota selaku penyelenggara jalan di kota Surabaya. Peraturan

1. Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah
2. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelenggaraan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional
3. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa.
4. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional
5. Penyelenggaraan jalan secara umum bagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

⁵Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan 24

Selain dalam pasal 24 di atas, dijelaskan pula kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam Pasal 238 dan 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:⁷

1. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
2. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

1. Pemerintah mengembangkan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

⁶ pasal 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 19
⁷ Pasal 238 Dan 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 112

kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:⁸

1. Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak yang belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Ketika terjadi kecelakaan lalulintas yang di sebabkan karena jalan rusak diwilayah kota Surabaya, maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diatas pemerintah dapat dituntut dan dijatuhi sanksi

⁸ Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pemerintah yang menjadi penanggungjawab dalam pembahasan skripsi ini adalah Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang telah dipaparkan di tabel 4.1 jelas menyebutkan bahwa jalan kota adalah tanggungjawab pemerintah kota sebagai penyelenggara jalan yang pelaksanaannya di serahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota, maka penanggungjawab dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemerintah kota Surabaya yang di pimpin oleh Walikota Kota Surabaya.¹⁰

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Jalan Rusak Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Di Kota Surabaya

⁹ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta Deepublish, 2018), 209.

Suatu hukum, tidak akan terasa manfaatnya apabila penegakkannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakkan hukum yang benar. Konsekuensinya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat akan terganggu dan tujuan utama hukum tidak tercapai.¹²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوفُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

¹¹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2018), 149.

¹² Amrullah Ahmad, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 60 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 24.

¹³ *Al Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 100

¹³ *Al Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 100

Aparat penegak hukum dan *Uli'l Amri* bertugas untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat karena keduanya yang menjatuhkan hukuman bagi pelanggar hukum, maka dari itu aparat penegak hukum dan *Uli'l Amri* harus sangat berhati-hati dalam memproses dan menjatuhkan suatu hukuman. Penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 273 di dalam hukum pidana Islam tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maka dari itu, hukuman bagi penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dijatuhi dengan hukuman *Ta'zīr* yaitu hukuman yang ditentukan oleh *Uli'l Amri*. Hukuman dari *Ta'zīr* dilandaskan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak

¹⁴ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta:Gema Insani Press,1999), 45-46.

Ulama Abu Hanifah memberikan hukuman *Ta'zīr* terhadap penanggungjawab yang lalai akan tugasnya atau tanggungjawabnya. Hal ini disamakan dengan pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*Mā jara majra al-khaṭaʾ*). karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.¹⁶

Selain beberapa sanksi yang berkaitan dengan badan dan kemerdekaan yang telah dijelaskan di atas, ada pula sanksi *Jar īmah Ta'z īr* yang berkaitan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10-11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hukum pidana yang berlaku untuk penyelenggara jalan sehingga menimbulkan korban luka ringan dan / atau kerusakan kendaraan dan / atau barang di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Jika Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rabu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun pada praktik di lapangan, penegakan hukum pidana tersebut belum pernah dilakukan di Surabaya meskipun sudah banyak berita yang memungkinkan untuk adanya tindakan penegakan hukum. Namun aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian berdalih bahwa tidak ada yang melapor, maka penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika. 2005.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana. 2016.
- Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:Mengenang 65 tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifn, S.H..* (Jakarta:Gema Insani Press. 1996).
- Arifin. Busthanul.*Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah. Hambatan. dan Prospeknya*. Jakarta:Gema Insani Press. 1999.
- Arliman. Laurensius.*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*.Yogyakarta:Dee Publish. 2015.
- Bungin. Burhan.*Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.
- Dien Al Banna. *di Jalan ada Maut Hati-hati atau Mati*. (Jember:Jember Kata Media. 2017).
- Drs. Amrullah Ahmad. S.F..dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:Mengenang 65 tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifn, S.H..* Jakarta:Gema Insani Press. 1996.
- Hadi. Sutrisno.*Metodologi research II*.Yogyakarta: Andi offset. 1989.
- Iskandar.*Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*. (Yogyakarta:Andi Offset. 2016).
- Johan. Teuku Saiful Bahri.*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta Deepublish. 2018
- Manan. Teuku Abdul.*Mahkaman Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta Timur:Prenada Media Group. 2018
- Mulasari. Laila."Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam". *MMH*. jilid 41.Januari. 2012.
- Munajat. Makhrus.*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta:Logum Pustaka. 2004.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa. *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*. Jakarta:PT BPK Gunung Mulia. 2010.

- R. Saija dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta:Dee Publish. 2016.
- Rahardjo. Sapiro. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas. 2010.
- Rangkuti. Freddy. *Customer Care Excellence Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang: IAIN Walisongo. 2005.
- Santoso. Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta:Gema Insani Press. 2003
- Sholeh. Ari Prawira. *Kedudukan Peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan Perundang-undangan*. Cirebon:Ari Prawira WordPress. 2011.
- waluyo. Bambang. *penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta:sinar grafik. 2002.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika. 2009).
- Zakaria Syafei. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Al-Qalam*. Vol 31 no 1 (Januari-Juni. 2014).
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. (Jakarta:Prenada Media Grup. 2016).
- Tim Grasindo. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Jakarta:Grasindo. 2017
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014
- Tim Penyusun Kepolisian Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya*. Jakarta:Visi Media . 2007.
- Tim Penyusun YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 2007)
- Al Qur'an Dan Terjemah*. Kudus:Menara Kudus. 2010.
- Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus

